

## BAB 3

### METODOLOGI PENELITIAN

#### 3.1. Paradigma Penelitian

Paradigma merupakan kerangka berpikir yang mengarahkan cara pandang peneliti terhadap fakta kehidupan sosial dan bagaimana peneliti memperlakukan ilmu atau teori. Malik & Nograho (2016) mengibaratkan paradigma seperti sebuah jendela, dimana seseorang mengamati dunia luar atau tempat seseorang bertolak menjelajahi dunia dengan wawasannya (*world view*). Paradigma penelitian juga menjelaskan tentang bagaimana peneliti memahami suatu permasalahan serta kriteria pengujian untuk menjawab masalah penelitian (Lincoln & Guba, 1986:14).

Penelitian ini menggunakan paradigma *post positive* dimana penelitian bersumber dari fenomena yang dijadikan fokus penelitian, yaitu adanya indikasi penyelesaian TLHP yang belum optimal di Pemerintah Kabupaten Sanggau berdasarkan data yang telah diperoleh diawal penelitian (Salladien, 2004). Fenomena ini juga terjadi di Malaysia seperti dalam penelitian yang dilakukan oleh Loke (2016) yang menemukan bahwa salah satu kendala dalam audit kinerja di Malaysia adalah tidak dilaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan, namun penelitian tersebut tidak menjelaskan mengenai alasan tidak dilaksanakannya TLHP. Sari (2013) menyimpulkan beberapa kendala umum penyebab TLHP belum dilaksanakan secara maksimal di Provinsi Jawa Barat dan Banten, namun tidak menjelaskan secara mendalam permasalahan yang dialami auditi secara rinci. Kedua penelitian tersebut menggambarkan adanya indikasi masalah dalam pelaksanaan TLHP namun belum mampu memberi penjelasan mendalam mengenai permasalahan yang dialami auditi dalam penyelesaian TLHP. Hal

ini dikarenakan adanya batasan interaksi antara peneliti dan objek penelitian yang hanya diperoleh melalui hasil kuisisioner yang bersifat kaku. Peneliti merasa data-data yang diperoleh dari studi pustaka maupun hasil kuisisioner dalam penelitian tersebut serta informasi yang diperoleh peneliti dari data awal belum cukup untuk menjelaskan permasalahan yang menyebabkan belum optimalnya penyelesaian TLHP, maka perlu dilakukan verifikasi kembali dengan berbagai cara, sumber data, dan teori untuk mencapai objektivitas.

Menurut Denzin & Lincoln (1994:442), paradigma *post positive* lebih mampu mengantarkan pada tingkat pemahaman yang mendalam atas realita sosial yang majemuk dan kompleks. Paradigma *post positive* beranggapan bahwa realitas bersifat objektif namun tidak sepenuhnya dapat dilihat dengan benar oleh peneliti, hubungan antara peneliti dengan pihak yang diteliti tidak dapat dipisahkan melainkan bersifat interaktif namun dengan subjektivitas seminimal mungkin dalam menangkap realitas, serta pengamatan yang dilakukan secara natural dan bergantung pada teori yang dipergunakan dengan menggunakan kriteria kualitas penelitian (Guba & Lincoln, 1994:109).

Dalam paradigma *post positive* terdapat interaksi antara peneliti dengan informan yang memungkinkan peneliti memperoleh informasi secara rinci, namun bersifat netral sehingga mampu memberikan jaminan objektivitas. Peneliti akan melakukan interaksi yang erat dan netral dengan objek penelitian melalui wawancara dan pengamatan untuk mendapatkan informasi, persepsi dan pendapat informan secara langsung. Interaksi dilakukan secara intensif agar dapat memperoleh gambaran tentang realitas yang sesungguhnya dan informasi yang objektif.

Paradigma *post positive* mendasarkan pada verifikasi teori, maka pada penelitian ini menggunakan teori manajemen. Menurut Kamayanti (2016:56) teori dapat digunakan sebagai payung yang diturunkan dalam

metodologi hingga metode penelitian, dalam hal ini Teori Fungsionalisme Fayol (*Fayol's Functionalism*) digunakan sebagai alat analisis. Manajemen merupakan suatu proses menggunakan sumberdaya sesuai dengan tahapan-tahapannya (perencanaan, pengorganisasian, pemberian perintah, pengkoordinasian dan pengendalian) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penggunaan teori ini dinilai tepat karena yang akan dianalisis adalah suatu proses kegiatan dan permasalahannya sesuai dengan pandangan Fayol yang mengembangkan teorinya dengan fokus pada pemecahan masalah-masalah fungsional kegiatan manajerial. Kamayanti (2016:57) juga menjelaskan bahwa teori yang sudah ada (*existing theory*) yang digunakan di bagian pembahasan menunjukkan kebaruan dari penelitian.

### **3.2. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus (*study case*). Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif karena ingin mengetahui informasi yang detail dan lengkap mengenai proses penyelesaian TLHP yang dilakukan oleh auditi dan mengetahui permasalahan yang menyebabkan penyelesaian TLHP belum optimal, informasi ini hanya dapat diperoleh dengan berbicara langsung dengan para pelaksana. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh Creswell (2014:60) yaitu untuk mengetahui permasalahan yang ada diperlukan pemahaman yang detail dan lengkap terhadap kejadian yang terjadi pada suatu situs tertentu, maka lebih tepat menggunakan pendekatan kualitatif. Moleong (2014:7) menyebutkan bahwa penelitian kualitatif bermanfaat untuk keperluan peneliti yang ingin meneliti sesuatu dari segi prosesnya, hal ini sesuai dengan penelitian ini dimana peneliti mengkaji proses penyelesaian TLHP. Penelitian ini bermaksud untuk

memahami fenomena yang terjadi pada proses penyelesaian TLHP dan peneliti mendeskripsikannya dalam bentuk kata-kata atau bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2014:6).

Peneliti menggunakan studi kasus sebagai strategi penelitian dimana peneliti menyelidiki dengan cermat suatu peristiwa/aktivitas/proses penyelesaian TLHP yang dilakukan auditi pada pemerintah Kabupaten Sanggau dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data dan akan melaporkan dalam bentuk deskripsi terhadap proses tersebut. Hal ini sesuai dengan Creswell (2014:135) bahwa penelitian kualitatif mengeksplorasi kehidupan nyata, pada kegiatan/kasus tertentu, pengumpulan data yang detail dan mendalam dengan berbagai sumber informasi, dan melaporkan deskripsi kasus. Peneliti menilai studi kasus lebih tepat digunakan untuk penelitian ini karena seperti yang dijelaskan oleh Yin (2014:1) bahwa studi kasus cocok digunakan untuk pertanyaan penelitian yang menggunakan *how* atau *why*, peneliti memiliki sedikit peluang untuk mengontrol peristiwa yang akan diselidiki, dan fokus penelitian terletak pada fenomena kontemporer dalam konteks kehidupan nyata. Tujuan studi kasus adalah untuk menggambarkan secara detail mengenai latar belakang, sifat-sifat, dan karakter khas suatu kasus, yang kemudian dijadikan suatu hal yang bersifat umum (Nazir, 2011).

### **3.3. Situs Penelitian**

Peneliti mengumpulkan data di lapangan dimana para informan mengalami masalah yang sedang dikaji dalam penelitian ini. Dalam lingkungan yang alamiah inilah, peneliti berinteraksi secara langsung (Cresswel, 2014:60). Situs penelitian dilakukan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau, dengan

pertimbangan bahwa masih terdapat jumlah pending TLHP yang cukup signifikan seperti data yang telah disajikan di Bab 1 Pendahuluan.

### 3.4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang secara langsung diperoleh dari sumber aslinya. Data primer yang dimaksud dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari informan melalui wawancara dan pengamatan peneliti maupun dokumen yang diterbitkan oleh objek penelitian.

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dan dicatat oleh pihak lain. Data sekunder dimaksudkan untuk memperdalam pemahaman terhadap permasalahan yang diteliti. Data sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan dan data yang diperoleh dari dokumen yang diterbitkan oleh BPK RI selaku pihak ektern dari pemerintah Kabupaten Sanggau. Tabel berikut menjelaskan data yang digunakan oleh peneliti:

**Tabel 3.1**

#### **Sumber Data Penelitian**

<b>DATA PRIMER</b>	<b>DATA SEKUNDER</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hasil wawancara dengan informan</li> <li>- Hasil pengamatan peneliti</li> <li>- Uraian tugas</li> <li>- Notulen rapat</li> <li>- Surat-surat</li> <li>- Disposisi</li> <li>- SK pembentukan Tim Ad Hoc, pembentukan Majelis Pertimbangan TPTGR dan pembentukan Tim TLHP BPK</li> <li>- Laporan penyelesaian TLHP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan perundang-undangan</li> <li>- LHP BPK</li> <li>- Rekapitulasi Hasil Pemantauan TLHP BPK</li> </ul>

### 3.5. Metode Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengumpulan data, metode yang digunakan peneliti, yaitu:

#### a. Wawancara

Untuk memperoleh suatu informasi dapat dilakukan dengan berbagai bentuk interaksi dengan orang lain. Widi (2010:240) menjelaskan bahwa wawancara merupakan interaksi antara 2 (dua) orang atau lebih dengan tujuan yang spesifik. Wawancara menurut Nazir (2011:193) adalah proses memperoleh keterangan dengan cara tanya jawab, bertatap muka langsung dengan informan, dan menggunakan panduan wawancara. Wawancara yang dilakukan merupakan jenis wawancara tidak terstruktur (*Unstructured interview*), dimana peneliti lebih bebas dalam merumuskan pertanyaan dan cara menjelaskan kepada informan serta diskusi yang menyertainya dalam melakukan kajian yang lebih mendalam (Widi, 2010:241). Denzin (1989:105) menjelaskan bahwa wawancara tidak terstruktur bertujuan memperoleh informasi dari semua informan, dimana susunan kata dan urutannya disesuaikan dengan ciri-ciri setiap informan.

Pedoman wawancara yang digunakan peneliti hanya berupa tema-tema umum atau garis besar pokok-pokok permasalahan yang akan ditanyakan, yang terdapat pada lampiran 1 (Bandur, 2014:94). Peneliti akan mendengar dan mencatat dengan seksama apapun yang disampaikan oleh informan dan berdasarkan analisis dari jawaban informan, peneliti dapat mengajukan pertanyaan lanjutan yang lebih mendalam dan terarah pada permasalahan yang dikaji. Terdapat 6 (enam) jenis pertanyaan yang digolongkan oleh Patton (1980:207), salah satunya yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis pertanyaan tentang pengetahuan, yaitu pertanyaan yang diajukan untuk memperoleh pengetahuan faktual informan yang

merupakan suatu fakta dari suatu kasus. Dalam melakukan wawancara maka peneliti juga membuat catatan-catatan kecil untuk mencatat hal-hal penting serta melakukan perekaman audio selama proses wawancara berlangsung.

Informan yang diwawancarai adalah Kepala OPD dan salah satu pejabat teknis yang menangani proses penyelesaian TLHP serta pihak Inspektorat selaku informan tambahan. Para informan ini dinilai dapat memberikan informasi mengenai proses penyelesaian TLHP. Kepala OPD merupakan pejabat tertinggi di instansinya yang memegang posisi paling strategis mengambil keputusan/kebijakan mengenai penyelesaian TLHP. Pejabat pelaksana yang mengetahui secara teknis proses penyelesaian TLHP di OPD sehingga peneliti dapat memperoleh informasi yang lebih detail mengenai teknis operasional pelaksanaan TLHP dilapangan serta memperoleh data yang sama dengan sumber yang berbeda, baik itu mengkonfirmasi ulang hasil wawancara dengan pemimpin dan memperoleh bukti dokumentasi untuk memperkuat pernyataan yang ada.

#### b. Pengamatan

Mengamati menurut Angrosino (2007) berarti memperhatikan fenomena dengan menggunakan panca indera peneliti maupun instrumen tertentu. Peneliti akan memperhatikan lingkungan fisik, informan, aktivitas, interaksi, dan percakapan yang berhubungan dengan pertanyaan penelitian selama proses pengamatan dilakukan. Pengamatan diperlukan untuk memperoleh keyakinan tentang keabsahan suatu data, untuk memahami situasi-situasi yang rumit dan perilaku yang kompleks, serta mengoptimalkan kemampuan peneliti (Moleong, 2014:174). Dalam penelitian ini akan dilakukan pengamatan terhadap berbagai hal yang berkaitan dengan proses penyelesaian TLHP yang bertujuan untuk membandingkan hasil wawancara dengan keadaan yang sebenarnya.

Peneliti melakukan pengamatan pada saat kunjungan lapangan dengan memperhatikan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para pegawai dan memperhatikan suasana kerja yang tercipta. Pengamatan juga dilakukan terhadap sikap informan pada saat wawancara dilakukan, khususnya untuk beberapa hal yang cukup sensitif mengenai penilaian terhadap peran kepemimpinan kepala instansi. Di samping itu, peneliti yang merupakan staf di subbag Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat Kabupaten Sanggau juga melakukan pengamatan pada saat kunjungan auditi ke Inspektorat untuk menyerahkan dokumen TLHP dan penanganan yang dilakukan pihak Inspektorat.

#### c. Dokumentasi

Dalam penelitian ini, peneliti memanfaatkan dokumen sebagai sumber data untuk menguji atau menafsirkan serta memperluas pengetahuan terhadap sesuatu yang ingin diselidiki (Moleong, 2014:217). Dokumentasi yang digunakan antara lain berupa data pemantauan TLHP, notulen rapat, uraian tugas, peraturan, surat-surat, laporan-laporan, disposisi, surat tugas, LHP, rekapitulasi pemantauan TLHP BPK, dan dokumen pendukung lainnya.

### **3.6. Penentuan Informan**

Dalam penelitian ini, peneliti ingin memperoleh informasi mengenai proses penyelesaian TLHP yang dilakukan oleh auditi di Pemerintah Kabupaten Sanggau, oleh sebab itu yang menjadi informan adalah pejabat di OPD pada Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau selaku pihak auditi secara khusus pejabat yang menangani TLHP dan Inspektorat Kabupaten Sanggau selaku unit pemantau TLHP di Pemerintah Daerah. Para informan ini dinilai mampu memberikan informasi yang valid dan reliabel yang



dibutuhkan peneliti karena para informan terlibat langsung dalam proses penyelesaian TLHP.

Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara purposif (*purposive*), yaitu pemilihan berdasarkan atas ciri atau sifat tertentu yang dinilai mempunyai keterkaitan dengan ciri atau sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya (Sutrisno, 1983). Informan yang terpilih adalah informan yang menangani proses penyelesaian TLHP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Badan Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah, serta Inspektorat sebagai informan tambahan. Peneliti melakukan pengumpulan data sampai data tersebut dinilai cukup dan dapat dipercaya.

Jumlah rekomendasi yang belum diselesaikan untuk Kabupaten Sanggau secara keseluruhan berjumlah 113 rekomendasi, maka dalam menentukan OPD yang akan diteliti, peneliti menentukan kriteria mengenai jenis pending rekomendasi yang akan dikaji secara khusus, yaitu:

1. OPD yang memiliki jumlah pending TLHP yang bersifat administrasi paling banyak.

Hal ini dikarenakan penyelesaian TLHP yang bersifat administrasi yang seharusnya cenderung lebih mudah untuk diselesaikan, namun pada kenyataannya masih banyak yang belum terselesaikan. Oleh karena itu, maka peneliti akan melihat bagaimana proses penyelesaian yang bersifat administrasi ini dilakukan. Tabel berikut menyajikan jumlah pending yang bersifat administrasi pada Pemerintah Kabupaten Sanggau.

**Tabel 3.2**  
**Rekapitulasi Pending TLHP BPK yang Bersifat Administrasi**  
**Tahun 2007-2016**

NO.	OPD	JUMLAH PENDING TLHP
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	41
2.	BPKAD	29
3.	Dinas PU	4
4.	Disperindagkop	2
5.	Kantor Camat Kapuas	2
6.	Sekretariat Daerah	2
7.	DISTANKANAK	1
8.	Dinas Kesehatan	1
9.	RSUD	1
	<b>TOTAL</b>	<b>83</b>

Sumber: Inspektorat Kabupaten Sanggau (data diolah)

Berdasarkan data tabel 3.1, maka diketahui OPD yang memiliki pending TLHP yang bersifat administrasi paling banyak adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, maka Informan yang dipilih adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Akuntabilitas Kinerja yang dinilai dapat memberikan informasi tentang proses penyelesaian TLHP di instansinya.

2. OPD yang memiliki jumlah pending TLHP yang bersifat pengembalian keuangan paling besar.

Penyelesaian TLHP yang bersifat pengembalian keuangan cenderung sulit atau lama untuk diselesaikan karena berkaitan dengan pihak eksternal maupun kelalaian personal, dimana uang yang seharusnya dikembalikan kemungkinan besar sudah digunakan. Sebagian besar pengembalian dilakukan dengan angsuran dan OPD selaku penanggungjawab perlu untuk memfasilitasi proses ini. Oleh karena itu, peneliti ingin melihat bagaimana pengaturan proses penyelesaian yang

bersifat pengembalian ini dilakukan. Tabel berikut menyajikan jumlah pending yang bersifat pengembalian keuangan pada Pemerintah Kabupaten Sanggau.

**Tabel 3.3**

**Rekapitulasi Pending TLHP BPK yang Bersifat Pengembalian Keuangan  
Tahun 2007-2016**

NO.	OPD	PENDING TLHP	
		Jumlah	Rp
1.	Sekretariat DPRD	3	2.084.706.100
2.	Dinas PU	11	1.626.215.610
3.	BPKAD	5	695.275.989
4.	Disperindagkop	1	354.864.167
5.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	4	251.275.194
6.	Dinas ESDM	2	219.855.850
7.	Dinas Kesehatan	1	62.358.400
8.	Sekretariat Daerah	2	27.254.779
9.	DISHUBKOMINFO	1	23.768.489
10.	BLHKPK	1	13.960.000
	TOTAL	30	5.359.534.578

Sumber: Inspektorat Kabupaten Sanggau (data diolah)

Berdasarkan data tersebut, maka diketahui OPD yang memiliki pending TLHP yang bersifat pengembalian keuangan paling banyak adalah Sekretariat DPRD dengan nilai pending TLHP sebesar Rp.2.178.304.000,00. Informan yang dipilih adalah Sekretaris DPRD dan Kasubbag Administrasi Keuangan yang dinilai dapat memberikan informasi tentang proses penyelesaian TLHP di instansinya.

3. OPD yang memiliki temuan berulang untuk beberapa tahun.

Terdapat temuan yang terus berulang selama beberapa tahun, yaitu pertanggungjawaban belanja bantuan hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan. Temuan ini terus terjadi setiap tahun dari tahun 2008 – 2015 dengan total nilai yang masih harus dipertanggungjawabkan sebesar Rp.6.863.329.985,00. Berdasarkan jenis temuan tersebut maka OPD yang bertanggungjawab adalah Badan Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah

(BPKAD). Informan yang dipilih adalah Sekretaris Badan dan Kepala Subbid Pengelolaan Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan Daerah.

Selain informan dari OPD, peneliti juga menentukan informan tambahan yang dinilai dapat memberikan informasi mengenai pelaksanaan TLHP secara keseluruhan di Kabupaten Sanggau. Maka informan yang dipilih adalah Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan pada Inspektorat Kabupaten Sanggau yang menangani masalah TLHP. Berikut disajikan data informan yang akan diwawancarai:

**Tabel 3.4**  
**Data Informan**

<b>No.</b>	<b>Nama Informan</b>	<b>Jabatan</b>
1.	Pak Sudarsono	Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.	Pak Anselmus	Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Akuntabilitas Kinerja Dikbud
3.	Pak Burhanuddin	Sekretaris DPRD
4.	Pak Abang Zunaedi	Kepala Sub Bagian Administrasi Keuangan Sekretariat DPRD
5.	Pak Aloysius Yanto	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
6.	Pak Martinus Dop	Kepala Sub Bidang Pengelolaan Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan Daerah BPKAD
7.	Pak Abang Suhardi	Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat Kabupaten Sanggau

Wawancara dengan kepala OPD dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai:

1. Peran kepala OPD dalam membuat perencanaan terhadap penyelesaian TLHP, antara lain mencakup respon kepala instansi terhadap temuan, diskusi intern yang dilakukan, strategi yang disusun, rencana kegiatan yang akan dilakukan, kebijakan yang telah dikeluarkan, dan penentuan sumberdaya.

2. Peran kepala OPD dalam pengorganisasian penyelesaian TLHP, antara lain mencakup alokasi sumberdaya, pembagian tugas dan pendelegasian wewenang.
3. Peran kepala OPD dalam memberi perintah dan arahan, antara lain mencakup upaya yang dilakukan pemimpin untuk menggerakkan tim dan memberikan tugas serta penjelasan kepada bawahan.
4. Peran kepala OPD dalam mengawasi proses koordinasi.
5. Peran kepala OPD dalam pengendalian, antara lain mencakup tindakan evaluasi dan koreksi yang dilakukan.

Wawancara dengan salah satu pejabat yang mengetahui teknis penyelesaian TLHP (Kasubbid Perencanaan dan Akuntabilitas Kinerja, Kasubbag Administrasi Keuangan, dan Kasubbid Pengelolaan Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan Daerah) dilakukan untuk memperoleh informasi yang lebih detail terkait pekerjaan dilapangan, antara lain mencakup jenis kegiatan yang dilakukan, pemahaman terhadap tugas-tugas yang diberikan, kegiatan koordinasi dengan pihak intern dan ekstern, pandangan mengenai peran pemimpin dan kendala-kendala yang dihadapi dalam proses penyelesaian TLHP, memperoleh bukti dokumentasi (daftar hadir dan notulen rapat, *action plan*, surat tugas atau disposisi dari atasan, kebijakan pemimpin yang dikeluarkan, surat, dan dokumen lain yang terkait) dan mengkonfirmasi/menegaskan kembali informasi yang telah diperoleh sebelumnya dari berbagai sumber. Wawancara dengan Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai upaya penyelesaian TLHP yang dilakukan secara umum, termasuk tingkah laku auditi, kendala-kendala yang alami, maupun pihak-pihak lain yang terlibat dalam mendukung penyelesaian TLHP.

### 3.7. Analisis Data

Analisis data kualitatif menurut Bogdan & Biklen (1992:73) adalah upaya yang dilakukan melalui bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting, dan menceritakan kepada orang lain. Dalam proses analisis data, peneliti berpedoman pada analisis data menurut Creswell (2014:251), yaitu dimulai dengan menyiapkan dan mengorganisasi data, yaitu hasil wawancara, pengamatan dan telaah dokumen. Langkah berikutnya adalah mereduksi data menjadi tema dengan melakukan pengkodean maupun peringkasan kode. Langkah terakhir adalah menyajikan data dalam bentuk pembahasan.

Berikut langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini:

1. Peneliti mempelajari penelitian sebelumnya terkait penyelesaian TLHP dan mencari kesenjangan yang ada agar dapat menghasilkan temuan baru.
2. Peneliti mengumpulkan data awal terkait data penyelesaian TLHP di Kabupaten Sanggau dan mengumpulkan berbagai peraturan perundang-undangan terkait.
3. Peneliti merumuskan pertanyaan penelitian, cara pengumpulan data, dan teknik pemilihan informan.
4. Peneliti melakukan pengumpulan data di lapangan, yaitu pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Badan Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah. Data yang dikumpulkan berupa data dari hasil wawancara dengan informan, didukung dengan dokumen pendukung lainnya yang diperoleh dari hasil pengamatan maupun dokumentasi untuk meyakinkan kebenaran data yang diperoleh.
5. Peneliti membaca keseluruhan isi transkrip wawancara secara keseluruhan dan berusaha menenggelamkan diri dalam detailnya dan mencoba

memaknai wawancara tersebut sebagai sebuah kesatuan (Creswell, 2014:256). Peneliti juga mencoba menghubungkan antara data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan hasil pengamatan dan dokumentasi untuk memperoleh informasi secara keseluruhan. Agar diperoleh keyakinan mengenai keabsahan data, maka hasil wawancara dengan kepala instansi kemudian dibandingkan dengan hasil wawancara dengan pejabat teknis yang dapat memberikan informasi yang diperlukan terkait informasi yang sama. Informasi hasil wawancara juga dibandingkan dengan dokumen pendukung lainnya seperti peraturan/kebijakan, notulen rapat, surat tugas, surat-surat, laporan dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang dikaji. Informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan selaku informan tambahan berupa informasi mengenai upaya pelaksanaan TLHP baik yang dilakukan oleh auditi maupun pemerintah daerah secara umum, informasi ini juga digunakan sebagai pembanding dengan hasil wawancara dengan pihak OPD.

6. Peneliti meneliti kembali data kasar yang telah diperoleh, meringkasnya dan mengelompokkannya berdasarkan kesesuaian masalah. Jika peneliti merasa data yang diperoleh kurang lengkap, maka peneliti mengumpulkan data kembali sampai peneliti merasa data tersebut sudah cukup dan dapat dipercaya. Data-data tersebut diolah sedemikian rupa menjadi satuan-satuan teks yang sesuai untuk dianalisis dalam bentuk deskriptif secara detail mengenai peristiwa yang diteliti. Proses pengkodean (*coding*) dimulai dengan mengelompokkan data teks menjadi kategori informasi yang lebih kecil, mencari bukti dari kode tersebut dari kumpulan data yang digunakan dalam studi (Creswell, 2014:256). Pengkodean dalam penelitian ini dilakukan secara sederhana untuk membantu mengidentifikasi

sumbernya, misalnya (a1) informasi dari informan 1 di Sekretariat DPRD, dan seterusnya.

7. Peneliti mengklasifikasikan ke dalam kategori atau tema tertentu. Dalam penelitian ini satuan dikategorikan sesuai dengan tahapan fungsi-fungsi manajemen menurut Teori Fungsionalisme Fayol (*Fayol's Functionalism*), yaitu perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pemberian perintah (*commanding*), pengkoordinasian (*coordinating*), dan pengendalian (*controlling*).
8. Peneliti menyajikan data dengan menyusun informasi-informasi menjadi pernyataan-pernyataan yang memungkinkan untuk penarikan kesimpulan. Data disajikan dalam bentuk deskripsi terhadap proses penyelesaian TLHP yang dilakukan auditi berdasarkan tahapan-tahapan dalam fungsi-fungsi manajemen dan menganalisis penyebab belum optimalnya penyelesaian TLHP pada auditi di Pemerintah Kabupaten Sanggau. Setelah penyajian data dilakukan maka peneliti membuat kesimpulan berdasarkan hasil temuan penelitian.